



PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KNPPM)

Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada

ISSN : 3031-304X (Print)

LITERASI INFORMASI DIGITAL UNTUK AKSELERASI KAPASITAS PEMUDA ADAT DALAM MENGAKSES KEBIJAKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL (PEMBERDAYAAN PEMUDA ANGGOTA MASYARAKAT ADAT SASAK)

Muhammad Ali¹, Pahrizal Iqrom^{2*}, Muhammad Aprian Jailani¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

²Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

*Surel Penulis Koresponden: pahrizaliqrom@gmail.com

ABSTRAK

Mayarakat Adat Sasak (MAS) merupakan lembaga adat penting di tengah pusaran proses kebijakan publik di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Pulau Lombok. Namun, dengan kepemilikan sumber daya berupa pemuda di dalam strukturnya, tidak membuat MAS cukup dipertimbangkan dalam kebijakan-kebijakan yang sifatnya kontemporer. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan ini berusaha untuk mengakselerasi kapasitas pemuda adat anggota MAS untuk mampu memanfaatkan informasi-informasi kebijakan yang maju dan tersedia secara digital. Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan. Hasil utama yang dituju melalui kegiatan ini adalah pengetahuan dan keahlian pemuda anggota MAS untuk menemukan informasi penting yang terkait dengan kebijakan publik, bagaimana memahami isi informasi tersebut dan menggunakannya untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi kebijakan publik sehingga tidak mengabaikan kearifan lokal. Dengan literasi informasi digital ini, kapasitas pemuda adat anggota MAS semakin baik dalam membangun argumen dan tidak terkesan tertinggal, tidak advance ataupun usang dalam keterlibatan mereka membangun kebijakan ataupun mengadvokasi kebijakan yang dibuat oleh lembaga horizontal atau vertikal yang lebih tinggi.

Kata Kunci

Literasi informasi digital; Pemuda adat; Kebijakan publik; Kearifan lokal; Masyarakat Adat Sasak

1. Pendahuluan

Orang Sasak di Lombok dan komunitas kecil orang Bali di Lombok Barat tentu saja sadar bahwa mereka tinggal pada sebuah pulau yang indah. Namun, hanya sebagian kecil orang di Eropa, Benua Amerika, Asia dan belahan dunia lainnya yang pernah mendengar tentang Lombok. Pulau ini memang tidak menghasilkan rempah-rempah (seperti buah pala, bunga pala, cengkih, atau lada) dan tekstil yang pada abad 16, 17, dan 18 telah menarik perhatian para pedagang Portugis, Belanda, dan Inggris ke bagian Kepulauan Malaya lainnya seperti Maluku, Pulau Banda, dan Semenanjung Malaya. Lombok pada awal abad ke-19 tidak masuk dalam jalur perdagangan. Sebagian besar desa-desa Sasak pada umumnya bersifat mandiri sehingga hanya ada sedikit perdagangan selain perdagangan barter. Kebutuhan akan uang hanya sedikit karena hanya menggarap lahan dan sebagian besar kebutuhan mereka telah terpenuhi oleh perekonomian desa, cakrawala pemikiran mereka hanya terbatas pada desa dan lingkungan sekitarnya saja.

Selama masa Orde Baru (1967-1997), pemerintah pusat menyadari perubahan yang terjadi di berbagai provinsi seperti NTB dan mendirikan kantor serta mengimplementasikan program di seluruh negeri. Beberapa kantor pemerintah memainkan peran utama dalam pengembangan kebudayaan di Lombok karena selain Universitas Mataram, provinsi ini tidak memiliki institusi pendidikan tinggi yang mempromosikan budaya, pendidikan, sejarah, atau kesenian. Namun, pada dekade belakangan ini, begitu banyak pemimpin dan warga yang mendirikan beragam organisasi untuk mempelajari dan mempromosikan sejarah, adat, dan seni. Salah satunya adalah MAS. Kini kebanggaan akan sejarah Sasak telah hadir kembali ke Lombok.

Meskipun demikian, MAS beserta tindakan mereka dianggap kurang memiliki gagasan yang *advance* di tengah masyarakat yang bergerak menjadi lebih modern. Primodialisme pemikiran mereka diasosiasikan dengan periode yang lebih kuno, sebelum masyarakat berkembang. Padahal, organisasi semacam MAS sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan identitas suatu daerah adat. Sebagai contoh, banyak kebijakan tradisional di pedesaan yang dilupakan begitu saja ketika anak dan keturunan mereka pindah ke perkotaan. Para pembuat kebijakan tersebut beserta karyanya disebut "kampungan" dan tak layak untuk dikenang.

Begitu pentingnya peran MAS dalam bangunan kebijakan yang berbasis kearifan lokal sehingga dibutuhkan upaya

lebih untuk memajukan pola pikir dan tindakan masyarakat adat di setiap desa. Kegiatan ini dilatari penelitian yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Metode

Metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan ini adalah melalui penyuluhan. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan literasi digital yang diberikan oleh tim penyuluh (Rizkiyah, dkk., 2020) yang dalam kegiatan ini dilakukan oleh dosen dari Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram.

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Tim penyuluh memberikan informasi awal berupa materi penyuluhan yang memuat aspek sebagai berikut.
 - a) Tim penyuluh memaparkan manfaat literasi digital dan pentingnya informasi digital yang dapat digunakan oleh pemuda anggota MAS ketika ingin/sedang berada dalam proses pembuatan kebijakan publik.
 - b) Tim penyuluh memberikan beberapa contoh halaman yang berisi informasi digital yang bermanfaat untuk memperkuat kapasitas pemuda anggota MAS dalam membuat kebijakan atau mengadvokasi kebijakan publik agar berbasis kearifan lokal serta bagaimana memahami dan menganalisis informasi tersebut sehingga menghasilkan gagasan tertentu terkait kebijakan yang relevan dengan isi informasi tersebut.
 - c) Tim penyuluh membuka sesi diskusi bagi pemuda adat anggota MAS untuk bertanya, berdiskusi, serta membangun pemahaman bersama mengenai harapan dan permasalahan yang mereka hadapi ketika mengakses informasi digital terutama terkait dengan kebijakan publik.
2. Tim penyuluh memberikan contoh bagaimana organisasi atau individu lain memanfaatkan informasi digital dalam melakukan advokasi kebijakan atau membangun agenda kebijakan.
3. Tim penyuluh mengamati perubahan pola pikir dan perilaku yang diharapkan, yaitu makin paham dan terampilnya pemuda anggota MAS dalam memanfaatkan informasi digital terkait kebijakan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Merekonstruksi kebijakan publik

Pada prinsipnya, harus ada kemauan dari pemerintah untuk membawa sistem kebijakan publik ke arah yang lebih aksesibel terhadap kemampuan warga negara sebagai seorang individu, bukan kemampuan negara sebagai pelaksana kebijakan. Pada paparan konsep tersebut, Provinsi NTB menjadi sebuah daerah yang mampu berdikari dan siap untuk tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan publik. Dengan demikian, orientasi dari sistem yang baik merupakan suatu upaya untuk menghadirkan peran kepala daerah dalam mengayomi segala bentuk tujuan bersama dengan kepentingan yang berbeda-beda melalui kebijakan publik yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat lokal.

Tidak dipungkiri jika MAS ikut membina karakter bangsa yang lebih terdidik sehingga perlu diperkuat melalui dukungan kebijakan yang progresif dan gerakan yang masif. Oknum pejabat bertingkah laku tak terpuji, seperti melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bercermin dari itu semua maka tindakan seperti apakah yang direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah?

Berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mempertahankan dan memajukan eksistensi organisasi dimulai dari usaha manusia itu sendiri dalam meningkatkan kinerja secara maksimal dan terarah. Dari pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator keberhasilan suatu gerakan organisasi dapat terlihat dan terwujud sumber daya manusia dan sumber daya lain yang ada dalam suatu organisasi secara bersama-sama membawa hasil akhir yang didasarkan pada tingkat mutu dan kualitas standar yang telah ditetapkan.

Dijelaskan oleh Williams, dkk. (2002) bahwa organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara terstruktur untuk mencapai tujuan menuju sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama dengan motivasi manusia itu sendiri. Maka, upaya merekonstruksi kebijakan publik perlu dilakukan bersama dengan lembaga masyarakat adat, terutama dalam menetapkan standar minimal penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan implementasi keberadaan masyarakat adat sebagai ujung tombak peningkatan moral dan akhlak masyarakat.

Terdapat tiga pertanyaan mendasar yang harus dijawab sebelum melakukan rekonstruksi kebijakan, antara lain sebagai berikut.

1. Apakah upaya konkret dari MAS untuk berperan aktif dalam memanfaatkan keberadaan jalur perdagangan ALKI 2 yang melewati Selat Lombok demi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Sasak?
2. Apakah pemerintah daerah sudah tegas dan mampu mengeluarkan kebijakan yang rasional dalam rangka mendorong terciptanya kolaborasi kokoh antara pemerintah dengan lembaga adat?

3. Bagaimanakah seharusnya kemampuan literasi yang baik untuk mendorong produktivitas intelektual pengurus MAS?

3.2. Literasi informasi digital bagi kapasitas aktor dalam kebijakan publik

Kemampuan literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber melalui komputer yang terkoneksi internet (Ashari & Idris, 2020). Dalam penelitian tersebut, peneliti merumuskan bahwa ada empat aspek kemampuan yang harus dimiliki dalam berliterasi digital, antara lain pencarian di internet (*internet searching*), pandu arah *hypertext* (*hypertextual navigation*), evaluasi konten informasi (*content evaluation*), dan penyusunan pengetahuan (*knowledge assembly*). Hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Bieza yang memandang literasi digital sebagai keterampilan yang luas dan kompleks dalam menggunakan teknologi digital dan mengontekstualisasikannya dalam informasi nonjaringan lainnya (Firmansyah, dkk., 2022), termasuk kebijakan publik. Begitu juga Kurniawati & Baroroh yang menyebutkan bahwa literasi digital merupakan ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, serta berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat (Candrasari, dkk., 2020). Pendapat tersebut terealisasi dengan tingkat pengguna digitalisasi yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Penggunaan internet dan media sosial di Indonesia (We Are Social & Hootsuite, 2023)

Pengguna media sosial dengan berbagai kalangan usia di masyarakat ditunjukkan oleh hasil survei We Are Social & Hootsuite (2023) yang menjelaskan bahwa dari 276,4 juta masyarakat di Indonesia pengguna internet di Indonesia telah mencapai 77% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2022 sekitar 77% yang sudah terhubung ke internet (APJII, 2022). Adapun data penggunaan media sosial di Indonesia berjumlah sekitar 167 juta jiwa atau sekitar 60,4% dari total pengguna internet yang ada di Indonesia.

Dalam membangun kapasitas aktor khususnya pemuda adat anggota MAS, penyuluhan diisi dengan simulasi melakukan pencarian informasi digital terkait kebijakan dari berbagai laman yang berpotensi memberikan informasi valid dan detail tentang isu yang diinginkan oleh pemuda, seperti halaman lembaga-lembaga pemerintah. Lembaga riset, lembaga akademik, dan media sosial yang dapat dipercaya, terbuka dan dialogis. Menemukan informasi digital tersebut juga harus disadari terkait dengan heterogenitas istilah yang bisa jadi sangat banyak ragamnya dan digunakan oleh aktor-aktor yang berbeda. Oleh karenanya, pemuda adat anggota MAS wajib untuk menilai isi atau konten yang ditampilkan oleh masing-masing penyedia informasi sebelum menggunakannya sebagai penopang argumen dalam membangun atau mengadvokasi kebijakan.

Pada tahap terakhir informasi digital tidak mungkin hanya bersumber dari sebuah situs tunggal, melainkan serupa sekumpulan besar data sehingga menjadikannya mudah dipahami dan menjadi gagasan yang kuat, pemuda anggota MAS perlu menyusunnya menjadi informasi yang akurat, sistematis, kuat, dan dipertimbangkan dalam pertarungan gagasan kebijakan.

3.3. Penyuluhan literasi digital untuk pemuda adat anggota MAS

Literasi digital untuk pemuda adat anggota MAS merupakan Inisiasi untuk menekan rendahnya angka literasi di Provinsi NTB. Bentuk transformasi dari literasi konvensional ke arah digitalisasi mengalami peningkatan tingkat literasi di NTB, tercatat tahun 2020 urutan 14 dari 34 provinsi, dan di tahun 2021 urutan 10 dari 34 provinsi (IPLM Provinsi NTB,

2022). Berdasarkan data tersebut, transformasi literasi digital memberikan pengaruh besar untuk pemuda dengan presentasi kalangan generasi sekarang yang didominasi para kalangan reamaja.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan untuk pemuda adat anggota MAS menjelaskan edukasi tentang menjaga budaya dan mengenalkannya melalui literasi digital kepada masyarakat nasional dan internasional (Gambar 2). Peranan masyarakat adalah sebagai garda terdepan dalam menginisiasi digitalisme dengan berbagai kreativitas dan inovasi. Hasil menunjukkan sebagian para pemuda/anggota pemuda MAS didominasi dengan pengetahuan yang sudah familiar dengan media sosial dengan kreativitas dan inovasi yang dimiliki, hal ini terlihat dari setiap akun media sosial dalam membuat media informasi sebagai bagian literasi digital terhadap informasi MAS.



Gambar 2. Penyuluhan literasi digital untuk pemuda adat anggota MAS

Koordinasi dan penyuluhan dilakukan dengan tujuan meingkatkan edukasi kepada peran serta pemuda dalam memanfaatkan digital sebagai media literasi yang mampu meningkatkan pengetahuan. Selama proses penyuluhan berlangsung, penulis mencatat poin penting yang menjadi catatan bahwa *mindset* pemuda saat ini masih identik dengan minimnya dukungan *resource*, baik anggaran maupun sarana pendukung. Hal ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan dengan teknologi yang memadai dalam membantu kreativitas dan inovasi yang ada, keterbatasan tersebut diarahkan penulis dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan melibatkan pemuda kreatifitas, khususnya pemuda anggota MAS.

Di sisi lain, secara sikap dan perilaku, para anggota menyambut baik dan positif dengan literasi digital yang memberikan keberhasilan dan efektifitas informasi dan teknologi yang cepat, hanya saja perlu memilah sumber informasi berdasarkan pada opini atau fakta.

4. Kesimpulan

Literasi informasi digital memberikan kemampuan kepada aktor kebijakan, dalam hal ini pemuda adat anggota MAS, untuk memanfaatkan informasi kontemporer terkait kebijakan yang akan mereka beri warna kearifan lokal. Dengan literasi informasi digital ini, kapasitas pemuda adat anggota MAS makin baik dalam membangun argumen dan tidak terkesan tertinggal, tidak *advance* ataupun usang dalam keterlibatan mereka membangun kebijakan ataupun mengadvokasi kebijakan yang dibuat oleh lembaga horizontal atau vertikal yang lebih tinggi.

5. Ucapan Terima Kasih

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Mataram dalam hal pendanaan dan dukungan lainnya selama kegiatan berlangsung. Demikian pula terhadap kolega dan staf di Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram dalam mendukung secara teknis dan substantif serta MAS yang memberikan kesempatan penulis untuk merealisasikan ilmu pengetahuan menjadi amal melalui lembaga ini.

6. Referensi

- Ashari, M, & Idris, N. S. (2020). Kemampuan literasi digital generasi digital native. *Seminar Internasional Riksa Bahasa*. <http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1019>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2022). Profil internet Indonesia 2022. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/survei>
- Candrasari, Y. C., Dyva Claretta, & Sumardjajti. (2020). Pengembangan dan pendampingan literasi digital untuk peningkatan kualitas remaja dalam menggunakan internet. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4),

611-618. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4003>

Firmansyah, D., Saepuloh, D., & Dede. (2022). Daya saing: Literasi digital dan transformasi digital. *Journal of Finance and Business Digital*, 1(3), 237–250. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i3.1348>

IPLM Provinsi NTB. 2022. Indeks pembangunan literasi masyarakat Provinsi NTB masuk sepuluh besar. Pemprov NTB. <https://www.ntbprov.go.id/>

Rizkiyah, N., Parwis, F., Y., & Fransori, A. (2020). Penyuluhan pemanfaatan literasi digital untuk pembelajaran online kepada orang tua dan murid di Villa Balaraja Desa Saga Balaraja Tangerang. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(1), 127–131.

We Are Social & Hootsuite. (2023). Digital 2023 Indonesia. *We are social*. <https://wearesocial.com/id/blog/2023/01/digital-2023/>

Williams, A. P., Woodward, S., & Dobson, P. (2002). *Managing change successfully: Using theory and experience to implement change*. Thomson.